PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2022

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategi sini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrument pengendalian

dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Jember, ……....

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember

Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR 4

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 SistematikaPenulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 14

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 14

2.1.1Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan KesatuanBangsa dan Politik ... 16

2.1.3Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb. 18

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24

2.2.1Kondisi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24

2.2.1Kondisi Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 25

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan KesatuanBangsa dan Politik 27

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26

3.2 TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 31

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi 38

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga 39

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi 43

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 48

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 48

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Strategis (KLHS) 49

3.5 Penentuan isu-isu strategis 51

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 52

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 52

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 101

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 104

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 37

BAB VIII PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) 16
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember 20
Tabel 3.1Pemetaan Permasalahan Pelayanan 29
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 36
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L 26
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi 26
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan 51
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 52
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan 33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember 35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Dinas/Badan/Kecamatan/Sekertariat Kabupaten Jember 31

Gambar 4.2 Cascading 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD KabupatenJember.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus menyesuaikan nomenklatur indicator sub kegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indicator sub kegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ProvinsiJawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten JemberTahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah KabupatenJember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isustrategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indicator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan StrukturOrganisasiPerangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karatkter Bangsa, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ayat(1) mempuyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat(1) sebagai berikut:

a. **Tugas Pokok**

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu koordinasi Hubungan Antar Lembaga, hubungan partai politik, hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mediasi Integrasi Bangsa, fasilitas Kajian Strategis dan Politis,menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan kebijaksanaan Bupati.

b. **Fungsi**

   1. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi bangsa dalam rangka memelihara stabilitas bangsa di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
   2. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan Kajian Strategisdan Politis.
   3. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
   4. Memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif, hubungan Partai Politik, Yayasan, Ormas dan LSM dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wilayah dan Politik.
   5. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif, Presiden Wakil Presiden dan pemilihan Bupati.
   6. Memfasilitasi pernyelenggaraan pengembangan sistem Pendidikan Politik, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Politik.

7. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan rencana penetapan nilai-nilai kepahlawanan serta mengkoordinasikan penetapan tanda penghormatan dan jasa .
8. Mengeluarkan dan mengkaji rekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya), hiburan/keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.
9. Merumuskan kebijakan strategis dan politis dibidang Ideologi Politik Sosial dan Budaya di Wilayah/Daerah.
10. Meningkatkan Ketahanan Nasional masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.Tugas Pokok

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b.Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di

lingkungan Badan.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan.
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan Badan.
4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Badan ; dan
5. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan semua unit organisasi di lingkungan Bakesbang dan Politik

3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

a. **Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. **Fungsi**

1. Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.
2. Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan.
3. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu – tamu keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggan lainnya.
4. Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi.
5. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan badan.
6. Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
7. Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan penditribusian peralatan/perlengkapan kantor.
8. Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah ; dan

9. Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
10. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, dsb.

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan karakter Bangsa

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

5. Bidang Politik Dalam Negeri

a.Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah

Kabupaten; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

7. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.

b. Fungsi

1. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan

bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Tugas Pokok

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagimana Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 3 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

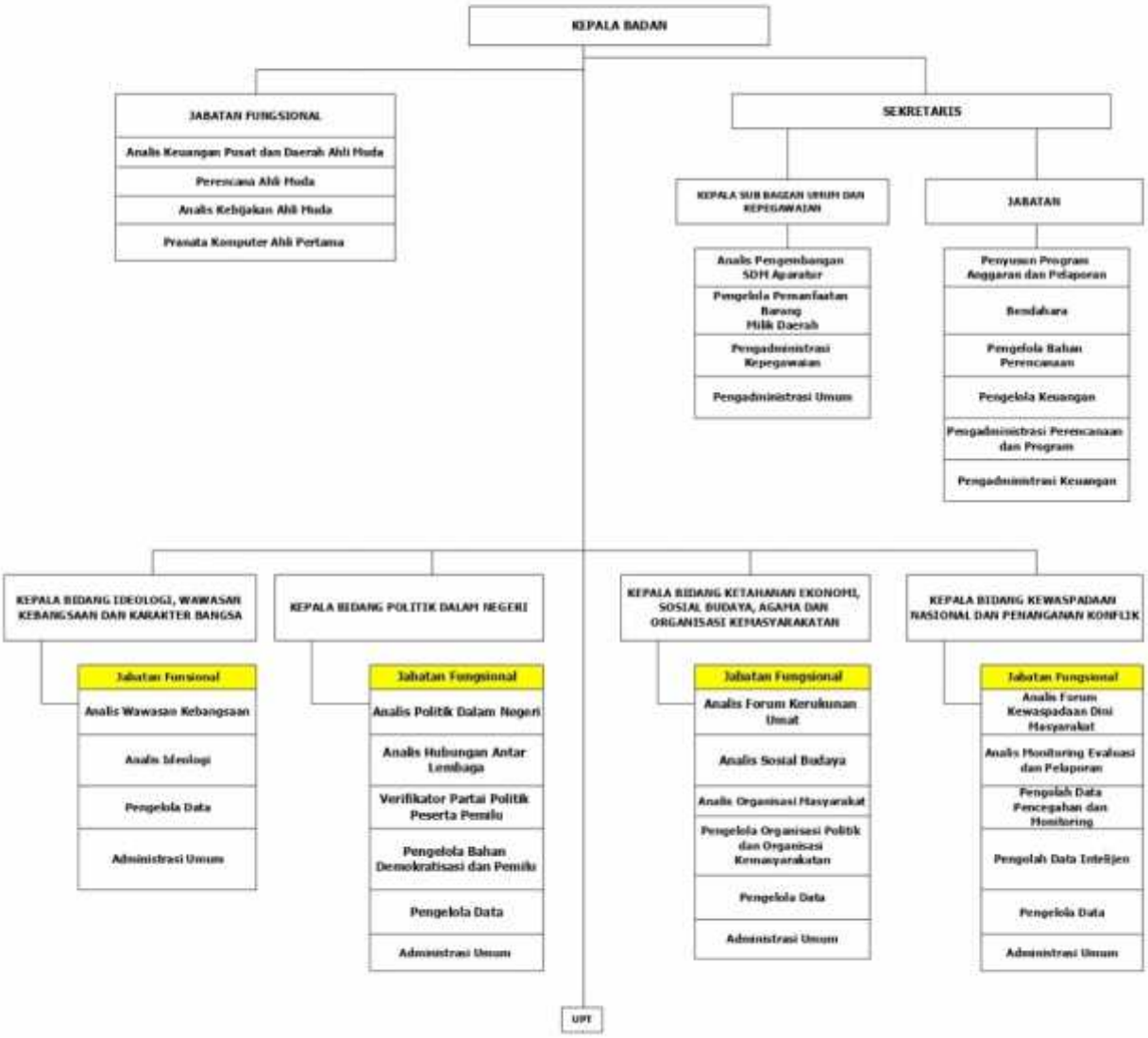

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan factor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (Subbag. Umum dan Kepegwaian dan Kelompok Jabatan Fungsional), 4 Kepala Bidang dan kelompok jabatan fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebanyak 34 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II b : 1 (Kepala Badan)
2. Eslon III a : 1 (Sekretaris)
3. Eslon III b : 4 (Kabid)
4. Eslon IV a : 1 (Kasubag)
5. Pejabat fungsional : 6
6. Staf/Non Eslon : 9 (PNS)
7. Staf : 12 (Non ASN)

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 34 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-3 :1
2. Sarjana S-2 :3
3. Sarjana S-1 :12
4. Diploma -3 :1
5. SLTA :15
6. SLTP :1
7. SD : -

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember						
No	KIB	JenisAset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai(Rp)
1	KIBA	Tanah	1		880	100.000.000,-
2	KIBB	Peralatan dan Mesin			-	2.455.231.982,-
3	KIBC	Gedung dan Banugunan				2.622.334.900,-
4	KIBD	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	KIBE	Aset Tetap Lainnya				3.776.000,-
	Jumlah Nilai Aset Tetap					5.181.342.882,-

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasasi Badan Pengelolaan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 5.181.342.882,- (Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Tigaratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 KIB A (Tanah) Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan	Ket.
					Hak	Sertifikat					
						Tgl	No				
1	Bangunan Gedung	800	1997	Jl. S Parman No. 89 Jember	Hak Pakai	4/20/1997	-	Kantor	APBD	100.000.000	
Total Rp.										100.000.000	

Tabel 2.2 KIB B (KENDARAAN BERMOTOR) Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Nama Barang	Jumlah	Merk Type	Tahun Pembelian	Kondisi	Harga	Ket
1.	Mobil	1	Inova	2013	Baik	222.400.000,00	
2.	Mobil	1	Suzuki Ertiga	2014	Baik	170.000.000,00	
3.	Pick Up	1	Toyota Kijang	2005	Baik	65.000.000,00	
4.	Sepeda Motor	1	Honda Revo	2008	Baik	12.500.000,00	
5.	Sepeda Motor	1	Kawasaki Trail	2011	Baik	23.550.000,00	
6.	Sepeda Motor	1	Yamaha Jupiter MZ	2007	Baik	15.000.000,00	
7.	Sepeda Motor	1	Yamaha Jupiter Scorpio Z	2007	Baik	7.240.000,00	
8.	Mobil	1	Suzuki Ertiga GX MT	2015	Baik	193.266.800,00	
9.	Sepeda Motor	1	Yamaha Mio	2015	Baik	14.820.000,00	
10.	Sepeda Motor	1	Yamaha Mio	2015	Baik	14.820.000,00	
11.	Sepeda Motor	1	Yamaha Mio	2015	Baik	14.820.000,00	
Jumlah Alat Angkutan		**10**	**Jumlah Total**			**753.416.800,00**	

Tabel 2.3 KIB C (Gedung dan Bangunan)
Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kondisi Bangunan	Letak Lokasi Alamat	Luas (m2)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Ket.
Baik	Letj. S.Parman 89	880	Hak Pakai	APBD	57.067.750,00	
Baik				APBD	18.000.000,00	
Baik				APBD	665.385.000,00	
Baik				APBD	2.977.400,00	
Baik				APBD	1.635.597.000,00	
Baik				APBD	4.103.600,00	
Baik				APBD	1.500.000,00	
Baik	Letj. S.Parman 89			APBD	19.994.150,00	
Baik	Letj. S.Parman 89			APBD	135.825.000,00	
Baik	Letj. S.Parman 89			APBD	26.950.000,00	
Baik	Perum Milenia			APBD	54.935.000,00	
Total Aset					**2.622.334.900,00**	

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dari KIB A sampai dengan KIB E termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target RenstraPerangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak krimina				100%	0%	100%	100%	100%	97,66%	0%	86,66%	45,05%	0%	97,66%	0%	86,66%	45,05%	0%
2.	Persentase Pengembangan Wawasan				100%	100%	100%	100%	0%	99,85%	42,24%	95,85%	13,40%	0%	99,85%	42,24%	95,85%	13,40%	0%

	Kebangsaan																	
3.	Persentase Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	61,89%	17,06%	0%	0%	100%	61,89%	17,06%	0%
4.	Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
5.	Persentase				100	100	100	100	100	97,6	88,0	94,8	89,3	26,9	97,6	88,0	94,8	89,3	26,9

	Pendidikan Politik Masyarakat				%	%	%	%	%	3%	4%	6%	5%	8%	3%	4%	6%	5%	8%
6.	Persentase Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik				100 %	100 %	0%	100 %	0%	98%	71,32%	0%	0%	0%	98%	71,32%	0%	0%	0%
	Persentase Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia				0%	100 %	0%	100 %	0%	0%	62,26%	0%	88,53%	0%	0%	62,26%	0%	88,53%	0%

8.	Persentase Peningkatan dan Pemajuan Perunda ng_unda ngan				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Persentase Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85,94%	98,94%	74,54%	63%	0%	85,94%	98,94%	74,54%	63%	0%

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain :

1. Pembentukan Kader Bela Negara dengan sasaran : Aparatur,Pelajar,Elemen Masyarakat.
2. Melaksanakan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
3. Sosialisasi Pemilu terhadap masyarakat/pemilih pemula untuk menekan golput pada saat Pemilihan Umum
4. Melaksanakan pertemuan inter dan antar umat beragama di kabupaten Jember LPP

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran Pada Tahunke-					Realisasi Anggaran pada Tahunke-					Rasio antara Realisasi dan Anggararan Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,132,704,850	746,491,000	780,190,700	1,124,855,500	905,336,500	1,089,703,218	636,418,901	737,151,335	873,417,747	530,831,237	96.20 %	85.25 %	94.48 %	77.64 %	58.63 %	93,79%	77,35%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	377,198,000	218,405,000	219,139,900	273,516,600	273,516,000	356,407,786	168,209,564	179,485,000	181,829,170	75,955,006	94.48 %	77.01 %	81.90 %	66.47 %	7.76%	27,23%	19,23%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,825,000	86,452,000	82,702,000	0	0	26,388,000	74,580,000	64,222,000	0	0	78.01 %	86.26 %	77.65 %	0	0	4%	3,3%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44,598,000	29,600,000	28,527,000	0	0	41,737,000	18,139,000	19,884,000	0	0	93.58 %	61.28 %	69.70 %	0	0	2,%	1,59%
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	903,000,000	0	0	0	0	903,000,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	18%	18%
Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	15,455,000	7,000,000	14,585,000	0	0	15,351,250	7,000,000	13,123,000	0	0	99.328696	100	89.976002 74	#DIV/0!	#DIV/0!	740,800,000	709,485,000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	388,840,000	424,980,700	492,950,000	908,490,000	479,900,000	379,726,000	404,638,200	427,200,000	409,260,000	0	97.65%	95.21%	86.66%	45.04%	0%	53,9%	32,41%
Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	1,005,600,000	1,409,915,100	1,195,451,600	779,704,900	0	1,004,050,000	595,593,100	1,145,816,400	104,446,500	0	99.84%	42.24%	95.84%	13.39%	0	87,81%	56,99%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	141,957,000	174,435,000	313,244,600	1,131,370,000	1,072,830,000	138,587,000	153,567,000	297,142,512	,010,827,742	289,400,000	97.62%	88.03%	94.85%	0	26.97%	56,67%	0
Program Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik	705,117,000	121,250,000	0	71,200,000	0	691,939,500	86,479,600	0	0	0	98.13%	71.32%	0	0	0	17,95%	15,56%
Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	56,145,000	42,940,000	81,865,000	57,140,000	57,140,000	48,250,000	42,486,850	61,025,000	36,000,000	0	85.93%	98.94%	74.54%	63.00%	0	5%	3,75%
Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	18,010,000	110,510,000	155,593,500	0	0	18,010,000	68,390,000	26,550,000	0	0	100	61.88%	17.06%	0	5,68%	2,25%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT	0	99,000,000	99,000,000	0	0	0	99,000,000	99,000,000	0	0	#DIV/0!	100	100	-	-	3,96%	3,96%
Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi	0	63,285,500	0	1,741,774,500	0	0	43,829,800	0	1,542,079,430	0	#DIV/0!	69.25%	-	88.5349642	-	36,10%	31%

Manusia																
Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	0	7,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145%	0
	4,804,439,850	3,449,044,300	3,319,165,800	6,243,645,000	2,788,722,500	4,695,139,754	2,347,952,015	3,319,165,800	4,184,410,589	896,186,243							

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
      2) Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
      3) Adanya akses yang baik kepada partai politik

4) Adanya koordinasi yang baik di jajaran Forkopimda, Forkopimca (Muspika) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
5) Tersedianya Sumber Daya Manusia
6) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral (Tim Wasdin, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Peran FKUB, FKDM, FPK, Jaring Alumni KBN (Kader Bela Negara)

b. Kelemahan

1)Terbatasnya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi
2)Kompetensi sumber daya aparatur yang belum optimal (kurangnya personil)
3)Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
4)Peran Badan Kesatuan Bngsa dan Politik Kabupaten Jember secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember kurang dikenal masyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1) Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan partai politik
2) Partisipasi, Parpol, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi

b. Tantangan

1) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD
2) Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang ASN

3) Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

8.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menampung tanggung jawab dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Jember dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Degradasimoral(Perubahan perilaku)	1.Kenakalan Remaja	1. Rendahnya SDM, remaja putus sekolah 2. Dampak Globalisasi dan Media Sosial 3. Kurangnya Sosialisasi Wasbang 4. Kurangnya Pendidikan Bela Negara 5. Kurangnya rasa cinta tanah air dimasyarakat
2.	Permasalahan Sara	1. Konflik agama (seagama) 2. Konflik Rumah Ibadah	1. Kurangnya Toleransi 2. Kurangnya Sosialisasi SKB 2 Mentri
3.	Faham Radikalisme Dan Terorisme	Munculnya Kelompok Intoleransi	1. Kurangnya Sosialisasi WASBANG 2. Belajar Agama Secara Tekstual 3. Perlu Efektifitas Pengawasan terkait dengan Aliran Keagamaan 4. Sosialisai Terpadu

4.	Faham Radikalisme Usia Dini	Terbentuknya Kader-Kader Intoleransi Dan Anti NKRI Sejak Usia Dini	1. Kurangnya Pengawasan Kurikulum Sekolah 2. Tidak Adanya Peraturan Yang Tegas Terkait Kewajiban Kurikulum WASBANG di Lembaga Pendidikan 3. Menjamurnya Lembaga Pendidikan Islam terpadu 4. Sosialisasi Terpadu
5.	Pengawasan Dan Pemberdayaan ORMAS	1.Munculnya Ormas-ORMAS Illegal 2. Dualisme kepemimpinan/kepengurusan Ormas	1. Pemuktahiran 2. Data Ormas 3. Pembinaan dan Sosialisasi Tentang UU/PP ORMAS
6.	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Rendahnya Partisipasi Masyarakat	1. Peningkatan Pendidikan Politik pada Masyarakat 2. Perlu Dilakukan Sosialisasi Partisipasi Politik Masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan kedalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bias ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokohmasyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergis eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan "solutif" masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selamaini "marjinal" melalui pendayagunaan sumberdaya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokokvisi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; Kategori industry pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai kehilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumberdaya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing busines*s) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ketingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*) dan wisata religious ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 (Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislative, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainya) Tujuan ke1 (Meningkatlkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan

peningkatan kualitas pelayanan publik) dan Sasaran ke 10 (meningkatnya wawasan kebangsaaan masyarakat dan stabilitas politik di daerah) dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi Ke 2	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersediany a anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember setiap tahun; b. Adanya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM	a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan; c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan

		dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; c. Peningkatan peran dalam pemberdayaan partai politik, wawasan kebangsaan, demokrasi d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik; f. Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbangpol melalui terobosan –	menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan partai politik, elemen masyarakat; d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban.

		terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi partai politik, elemen masyarakat	

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dengan memperhatikan pengertian visi melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan Misi ke 3 (tiga) yaitu :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa timur **"Tata Kelola Pemerintahan** Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan".

Misi merupakan pondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi ,menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka misi Bakesbangpol Prov. Jatim yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin di capai sebagaiberikut :**"Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, dan Beretika dalam wadah NKRI".**

Dalam rangka pencapaian tujuan yeng telah ditetapkan Bakesbangpol Provinsi Jatim, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.
2. Meningkatnya penghormatan HAM.
3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan PemerintahanUmum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab/Kota di Jatim.

Sebagaimana Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah periode 2020-2024 adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri".** Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : "**Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa"** dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
   b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
   a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
      1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
      2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;
      3) Penguatan demokrasi di daerah;

4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.

b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
2) Deteksi dini oleh aparatur pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai instansi tingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten/Kota, sudah seharusnya apabila Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota mengacu dan mendukung RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026. Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten/Kota sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kesbangpol Provinsi Jawa Timur yang kedepan akan dijadikan acuan bagi Kesbangpol Kabupatan/Kota.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Perlunya kegiatan peningkatan kecintaan terhadap tanah air	Kurang massifnya kegiatan cinta tanah air dihadiri oleh masyarakat
Peningkatan Peran Partai olitik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Masyarakat masih belum memahami pentingnya pengetahuan politik dan urgensi penyelenggaraan demokrasi dalam pemilu	Pelaksanaan Pendidikan politik perlu diperbanyak dan diperluas lingkupnya	Pelaksanaan Pendidikan politik masih terbatas karena satu dan lain hal
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terdapat Sebagian ormas yang tidak melapor dan mendaftar	Melakukan penjaringan dan pendataan ormas secara berkelanjutan	Ormas yang belum terdaftar tidak mengetahu tata cara pendaftaran
Pembinaan	Adanya beberapa	Melakukan	Forum

dan Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya	konflik berbasis social, ekonomi maupun budaya	penguatan jaringan dan forum komunikasi	komunikasi yang terbentuk kurang efektif karena rendahnya koordinasi
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Masih terdapat sebagian gangguan ketertiban di masyarakat yang mengganggu kondusifitas daerah	Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dengan instansi terkait	Koordinasi yang dilakukan masih terhambat pola komunikasi

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Dengan memperhatikan pengertian visi melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur memiliki keterkaitan Misi ke 3 (tiga) yaitu : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa timur "Tata Kelola Pemerintahan 7 Renstra 2021-2026 Bakesbangpol Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan".

Misi merupakan pondasi penyusunan rencana strategis. Pernyataan misi ,emumjukkan dengan jelas sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu,

maka misi Bakesbangpol Prov. Jatim yang akan memberikan arah, tujuan dan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut : “Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, dan Beretika dalam wadah NKRI”.

Dalam rangka pencapaian tujuan yeng telah ditetapkan Bakesbangpol Provinsi Jatim, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.

2. Meningkatnya penghormatan HAM.

3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Perlunya penguatan peran pemerintah dalam meningkatkan kewaspadaan daerah deteksi dini dan cegah	Adanya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

	dini konflik sosial di daerah	Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	
Meningkatnya antisipasi dan respons terhadap konflik sosial di masyarakat Jawa Timur		Peningkatan peran dalam pemberdayaan partai politik, wawasan kebangsaan, demokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/

			semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur	Masih adanya ormas/LSM yang belum memahami peran dan fungsi di masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah	Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan partai politik, elemen masyarakat

		Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

		Peningkatan Sosialisasi eksistensi Bakesbang pol melalui terobosan – terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi partai politik, elemen masyarakat	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah**"Tujuan penataan ruang di Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh**

pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal". Peraturan Perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek 8 Renstra 2021-2026 Bakesbangpol pembangunan Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah. Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas ;

- Memelihara kewaspadan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban.
- Meningkatkan partisipasi masyatakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
- Memberdayakan kebhinnekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan bernegara. Pusat kegiatan wilayah dan pusat pelayanan kawasan meliputi Kecamatan se Kabupaten Jember.

Pengelolaan Tata Ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi Bakesbangpol dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, factor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS.

Stabilitas dan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan saling membutuhkan. Keberhasilan pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi tercapainya stabilitas nasional. Oleh karena itu momentum yang memungkinkan terpeliharanya pelaksanaan dan lajunya pembangunan daerah harus tetap dijaga dan terus dikembangkan. Stabilitas daerah tidak boleh diartikan sebagai pengekang kebebasan, dinamika, kreativitas, dan kemerdekaan masyarakat.Stabilitas diperlukan untuk menciptakan iklim 9 Renstra 2021-2026 Bakesbangpol yang memungkinkan berkembangnya kehidupan masyarakat semaksimal mungkin. Khusus dalam rangka memantapkan stabilitas daerah di bidang politik, antara lain perlu upaya untuk terus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pengamalan dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan sangat dipengaruhi oleh kualitas manusia pendukung dan pembela Pancasila.Dalam rangka ini pula kita perlu meningkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat, sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas yang mantap.Untuk itu perlu ditingkatkan pembangunan hukum nasional dan langkah-langkah pembinaan aparatur pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum, serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya. Bidang lain yang tidak kalah pentingnya untuk membantu tercapainya stabilitas politik adalah terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum. Oleh karenanya keamanan dan ketertiban umum perlu terus dipelihara bahkan

ditingkatkan untuk menjamin terpeliharanya stabilitas daerah dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan factor penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
2. Mendengarkan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan kesantunan; dan
3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasivisi dan misidalambentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"** dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk dalam **Misi ke-II** yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
SebelumPerubahan									
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualit	Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.	as.	Kebangsaan						
			Peningkatan Kader Bela Negara.	100 %	100 %				
			Terselenggaranya kegiatan Kader Bela	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Negara , Forum Pembauran Kebangsaan						
			Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wasbang di Sekolah SMP dan SMA (Bakesbang masuk Sekolah)	100 %	100 %				
			Tereselenggaranya kegiatan forum Pembauran Kebangsaan.	100 %	100 %				
			terselenggaranya pembentukan kader bela negara	100 %	100 %				
			terlaksanannya jambore kebangsaan	100 %	100 %				
			Terlaksanannya Monitoring	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan						
			Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat	100 %	100 %				
			Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	100 %	100 %				
			umlah program kerja yang disusun 1. Penyaluran bantuan keuangan parpol 2. forum silaturahmi bagi fungsionaris parpol	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			3. sosialisasi peraturan tentang politik						
			terselenggaranya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan dana pada partai politik	100 %	100 %				
			terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	100 %	100 %				
			peningkatan peran dan efektifitas koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu Desk	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			terselenggaranya kegiatan monitoring tim pemantau perkembangan politik	100 %	100 %				
			kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik	100 %	100 %				
			Terselenggaranya Forum Silaturahmi ormas	100 %	100 %				
			jumlah program kerja yang disusun 1. Forum Silatuhrahmi Ormas/LSM 2. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas 3.	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Pemutakhiran Data Base Ormas						
			tersedianya data base organisasi kemasyarakatan	100 %	100 %				
			terselenggaranya pemutakhiran data ormas	100 %	100 %				
			Tim Terpadu Pengawasan Ormas	100 %	100 %				
			Pembinaan dan Pengawasan Ormas	100 %	100 %				
			terlaksanyanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100 %	100 %				
			Peningkatan Kapasitas	100	100				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kerukunan Umat Beragama	%	%				
			Jumlah rencana kerja yg disusun 1. pemberdayaan FKUB 2. Fasilitasi pendirian BNNK 3. gerakan antiradikalisme generasi muda 4. sarasehan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 5. monitoring dan evaluasi	100 %	100 %				
			1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2. Fasilitasi program	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			P4GN (Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba						
			Terlaksanannya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama	100 %	100 %				
			terselenggaranya sarasehan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	100 %	100 %				
			terselenggaranya sarasehan kegiatan gerakan anti radikalisme dan terorisme	100 %	100 %				
			Jambore FKUB	100	100				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				%	%				
			Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi	100 %	100 %				
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap	100 %	100 %				
			Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	100 %	100 %				
			Pembentukan FKDM berdasar pada Permendagri No. 2 Th. 2018 Jo Permendagri No. 46 Th.	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			2019 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah						
			Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN)	100 %	100 %				
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pelaporan Periodik B-4, B-8, B-12	100 %	100 %				
			Terlaksanannya Sosialisasi Undang-undang No. 7 Th. 2012 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial	100 %	100 %				
			Terlaksanannya Sosialisasi dan Fasilitasi	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Perpres No. 7 Th. 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme						
			Terselenggaranya Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100 %	100 %				
			jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	100 %	100 %				
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %				
			Terbayarnya						

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			honor pengelola keuangan	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen DPA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen perubahan DPA dan RAPBD yang dikerjakan	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tepat waktu						
			Jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %				
			Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	100 %	100 %				
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %				
			tersedianya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi SKPD	100 %	100 %				
			Jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %				
			Persentase penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Realisasi Anggaran SKPD						
			Tercukupinya administrasi umum di OPD	100 %	100 %				
			Tersedianya Komponen Instalasi Litrsik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %				
			Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %				
			Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	100 %				
			tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100 %				
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			n						
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %				
			tersedianya fasilitas kunjungan tamu	100 %	100 %				
			Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %				
			tersedianya arsip dinamis pada SKPD	100 %	100 %				
			tersedianya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %				
			Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %				
			tersedianya mebeler	100	100				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			kantor	%	%				
			tersedianya peralatan kantor	100 %	100 %				
			Tersedianya gedung kantor atau bangunan	100 %	100 %				
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100 %	100 %				
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %				
			Terbayarnya jasa surat menyurat dan operasional Kantor	100 %	100 %				
			Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100 %	100 %				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Prosentase terpenuhinya peralatan dan bahn perlegkapan kebersihan Kantor	100 %	100 %				
			tersedianyan jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %				
			terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %				
			terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan dinas	100 %	100 %				
			terpeliharanya mebel kantor	100 %	100 %				
			terpeliharanya peralatan	100	100				

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			dan mesin lainnya	%	%				
			Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %	100 %				
Setelah Perubahan									
	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. pendukung kegiatan ekonomi sosial	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.	Persentase Pelaksanaan Pemahaman Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan			100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.								
			Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,			6	7	7	8

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun						
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			5	6	6	7
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang			750	750	750	800

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			5	6	6	7
			Jumlah Orang yang Mengikuti			250	250	250	275

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan			4	4	4	4

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Sejarah Kebangsaan						
			Persentase Peningkatan pendidikan Politik Masyarakat			100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,			100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			serta Pemantauan situasi Politik						
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di			11	11	11	11

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Daerah yang Disusun						
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			11	11	11	11
			Jumlah Orang yang						

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahPerwakilan dan Partai Politik, Pemilihan						

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			30	30	30	30
			Jumlah Laporan			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
			Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan			100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Penanganan konflik sosial						
			Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang			6	6	6	6

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
			Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan			300	300	300	300

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Konflik						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			35	35	35	35
			Jumlah Laporan Hasil			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	100 %	100 %	100 %
			Terbayarnya			100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			honor pengelola keuangan			%	%	%	%
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan			4	4	4	4

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	4	4
			Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor						
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22	22	22	22
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	12	12	12
			Jumlah Dokumen Penatausaha			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			an dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksnaan Akuntansi SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD						
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22	22	22	22
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Paket Komponen			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen			12	12	12	12

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1	1	1
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD			1	1	1	1
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			n Berbasis Elektronik pada SKPD						
			Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1	1	1
			Persentase Pelaksanaan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1	1	1
			Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1
			Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	1	1	1
			Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajakanya						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1	1	1	1
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			1	1	1	1
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1	1	1	1
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			1	1	1	1
			Jumlah Aset Tak			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Berwujud yang Dipelihara						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1	1	1	1
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1	1	1	1
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1	1	1	1

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorTujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahunke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026

Gambar 4.1 *Logical Framework* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenJember

TUJUAN	"Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah."		
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi		
URUSAN	Pemerintahan Umum		
SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas.		
INDIKATOR	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
	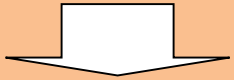		

BIDANG PENGAMPU	BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK program dan indikator
BIDANG PENGAMPU	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN HAK ASAZI MANUSIA
BIDANG PENGAMPU	BIDANG KAJIAN STRATEGIS DAN POLITIS
	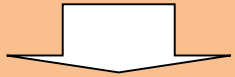
BIDANG PENGAMPU	

Gambar 4.2Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

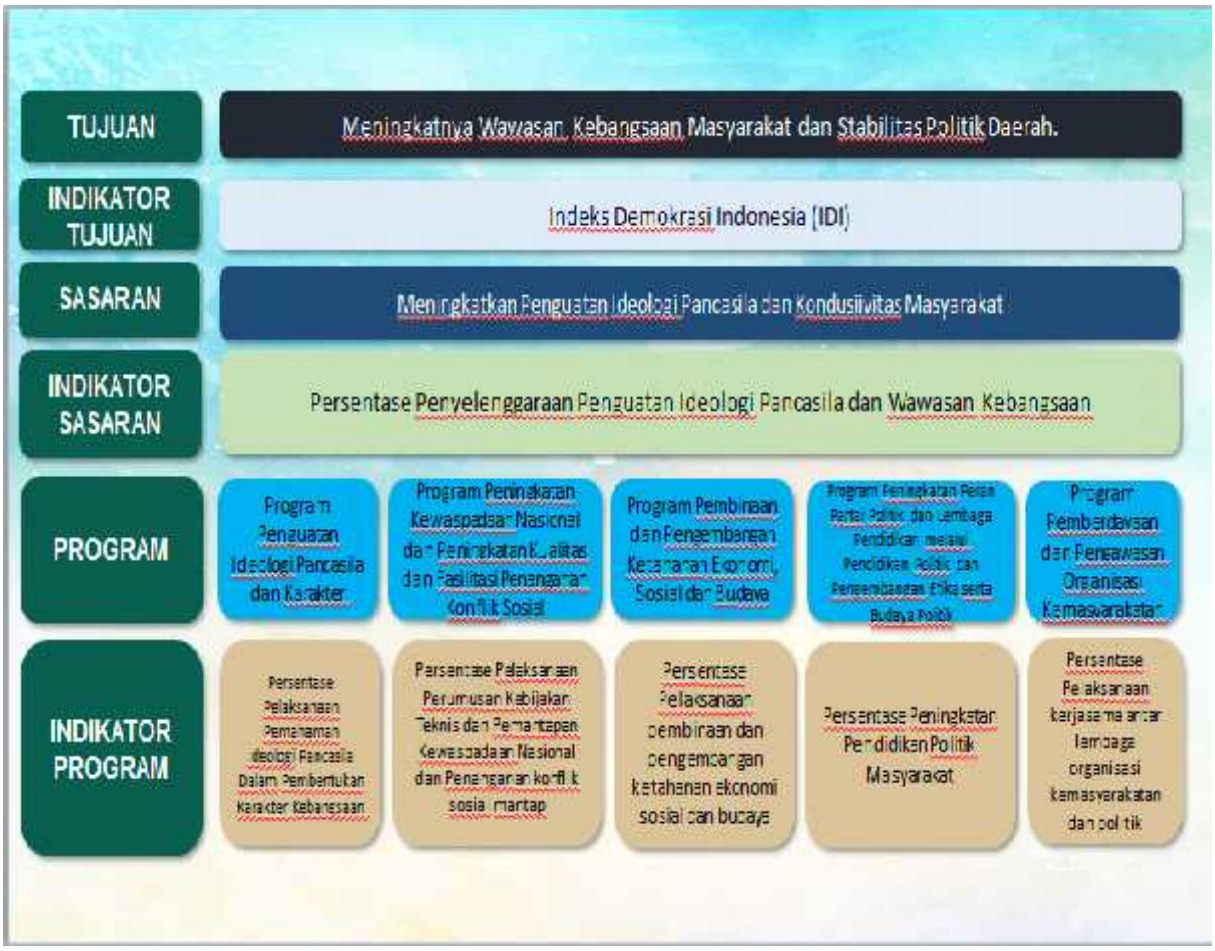

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: "SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"			
MISI II: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas. infrastruktur yang berkualitas dan merata	1. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 2. Memelihara Kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemcahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	a.Megembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan Nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI
Setelah Perubahan			
Misi II: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik	A.Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat	a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasiitasi/upaya penanganan konflik sosial
		2. Memelihara Kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya Pemcahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi,	b.Megembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan Nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI

		sosial budaya, keamanan dan ketertiban	
		3.Penguatan Kapasitas kelembagaan	c.Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental (GTGNRM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Tim Wasdin), Pokja Rencana Aksi Dalam Penanggulangan Ekstrimisme (RAT-PE) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
		4.Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	d.Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosilisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan dalam masyarakat
		5.Peningkatan Upaya Pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama	e. Melaksanakan sinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penguatan kerukunan umat beragama
	B. Meningkatnya kualitas demokrasi di Pemerintah Kabupaten Jember	6.Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Politik	F. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat
		7.Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	g. Melaksanakan sosialisasi, FGD Organisasi Kemasyarakatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudan yakin kerja serta pencapaian hasil *(outcome)* sebuah program dan hasil *(output)* kegiatan. Sehingga indicator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan KesatuanBangsa dan Politik KabupatenJember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan KerangkaPendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhirperiode RenstraPerangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sebelum Perubahan																						
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	'8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter**	**Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**100 %**	**670.000.000**	**100 %**	**720000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.02.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Peningkatan Kader Bela Negara.**	**100 %**	**100 %**	**670.000.000**	**100%**	**720.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Terselenggaranya kegiatan Kader Bela Negara , Forum Pembauran Kebangsaan	100 %	100 %	120.000.000	100%	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bakesbangpol	Kab. Jember

				Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			8.01.02.2.01.02	Perumusan kebijakan tehnis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penguatan Karakter Bangsa melalui kegiatan Wasbang di Sekolah SMP dan SMA (Bakesbang masuk Sekolah)	100 %	100 %	75.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Tereselenggaranya kegiatan forum Pembauran Kebangsaan - terselenggaranya pembentukan kader bela negara	100 %	100 %	350.000.000	375.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Bela	Terlaksananya jambore kebangsaan	100 %	100 %	75.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	Terlaksananya Monitoring evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	50.000.000	100%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01,.03	**2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat**	**100 %**	**100 %**	**3.555.000.000**	**100%**	**3.950.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.03.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik**	**100 %**	**100 %**	**3.555.000.000**	**100%**	**110.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

				pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik																	
			8.01.03.2.01.03	Sub Keg. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemnataun situasi politik di daerah	jumlah program kerja yang disusun 1. Penyaluran bantuan keuangan parpol 2. forum silaturahmi bagi fungsionaris parpol 3. sosialisasi peraturan tentang politik	100 %	100 %	3.000.000.000	100%	3.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.03.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	terselenggaranya kegiatan Fasilitasi, verifikasi dan pelaksanaan penyaluran bantuan dana pada partai politik	100 %	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik , pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	100 %	100 %	75.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.03.2.01.04	pelaksanaan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politilk, pemilihan uimum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	peningkatan peran dan efektifitas koordinasi dukungan kelancaran pelaksanaan pemilu Desk	100 %	100 %	150.000.000	100%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.03.2.01.05	pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politilk, pemilihan uimum/pemilihan umum kepala daerah, serta	terselenggaranya kegiatan monitoring tim pemantau perkembangan politik	100 %	100 %	70.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				pemantauan situasi politik di daerah																		
			8.01.04	**3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik**	**100 %**	**100 %**	**230.000.000**	**100%**	**260.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.04.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Terselenggaranya Forum Silaturahmi ormas**	**100 %**	**100 %**	**230.000.000**	**100 %**	**260.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.04.2.01.01	Sub Keg. penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing di Daerah	jumlah program kerja yang disusun 1. Forum Silatuhrahmi Ormas/LSM 2. Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas 3. Pemutakhiran Data Base Ormas	100 %	100 %	125.000.000	100%	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.02	penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberda	tersedianya data base organisasi kemasyarakatan	100 %	100 %	20.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				yaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah																			
			8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	terselenggaranya pemutakhiran data ormas	100 %	100 %	20.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tim Terpadu Pengawasan Ormas	100 %	100 %	25.000.000	100%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberda	Pembinaan dan Pengawasan Ormas	100 %	100 %	40.000.000	100%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				yaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			'8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**terlaksanyanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**100 %**	**100 %**	**225.000.000**	**100 %**	**247.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.05.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama**	**100 %**	**100 %**	**225.000.000**	**100%**	**247.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.05.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya	Jumlah rencana kerja yg disusun 1. pemberdayaan FKUB 2. Fasilitasi pendirian BNNK 3. gerakan antiradikalisme generasi muda 4. sarasehan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba 5.	100 %	100 %	75.000.000	100 %	77.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				an di Daerah	monitoring dan evaluasi																		
			8.01.05.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	1. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 2. Fasilitasi program P4GN (Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	100 %	100 %	50.000.000	100%	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, soisal,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	1.Terlaksannya Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 2. terselenggaranya sarasehan pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 3. terselenggaranya sarasehan kegiatan gerakan anti radikalisme dan terorisme	100 %	100 %	30.000.000	100%	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Jambore FKUB	100 %	100 %	60.000.000	100%	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan, ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelaporan monitoring dan evaluasi	100 %	100 %	10.000.000	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap**	**100 %**	**100 %**	**335.000.000**	**100%**	**375.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.06.2.01	**Keg. Perumusan**	**Terlaksananya Pemberday**	**100 %**	**100**	**335.000.000**	**100%**	**375.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bakesba**	**Kab. Jem**

				Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	**aan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)**		**%**															**ngpol**	**ber**
			8.01.06.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Pembentukan FKDM berdasar pada Permendagri No. 2 Th. 2018 Jo Permendagri No. 46 Th. 2019 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah	100 %	100 %	50.000.000	100%	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.06.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan Kewaspadaan Dini, kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspad	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini (WASDIN)	100 %	100 %	75.000.000	100%	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				aan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di Daerah																		
			8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Pelaporan Periodik B-4, B-8, B-12 2. Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang No. 7 Th. 2012 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial 3. Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Perpres No. 7 Th. 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ektremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme	100 %	100 %	100.000.000	100%	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terselenggaranya Sarasehan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100 %	100 %	60.000.000	100 %	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di BIdang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	100 %	100 %	50.000.000	100%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**5.483.803.916**	**100%**	**6.458.621.880**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.01	**Keg. Perencaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terbayarnya honor pengelola keuangan**	**100 %**	**100 %**	**11.250.000**	**100%**	**298.722.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	100 %	100 %	311.342.000	100%	284.222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %	2.500.000	100%	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %	1.000.000	100%	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %	1.000.000	100%	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	100 %	100 %	2.500.000	100%	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %	3.000.000	100%	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

				Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi																			
			8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %	1.250.000	100%	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02	**Keg. Administrasi Keuangan**	**Persentase penyediaan tenaga pendukung**	**100 %**	**100 %**	**4.158.893.880**	**100%**	**4.280.077.780**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.02.01	Pnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	3.847.356.032	100%	3.943.539.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi SKPD	100 %	100 %	151.537.848	100%	161.537.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	100 %	85.000.000	100%	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	100 %	100 %	75.000.000	100%	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tercukupinya administrasi umum di OPD**	**100 %**	**100 %**	**932.466.800**	**100%**	**1.222.396.500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Litrsik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	3.202.500	100%	3.402.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	100 %	10.000.000	100 %	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	100 %	100 %	65.406.000	100%	67.406.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.05	Penyediaan bahan cetakan dan pengganda an	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengganda an	100 %	100 %	17.900.300	100%	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	3.000.000	100%	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	100 %	100 %	5.280.000	100%	5.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	100 %	49.608.000	100%	52.608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	tersedianya arsip dinamis pada SKPD	100 %	100 %	25.000.000	100%	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	20.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan**	**Tersediany a barang penunjang urusan Pemerinta h Daerah**	**100 %**	**100 %**	**141.535.000**	**100%**	**250.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

				g Urusan Pemerintah Daerah																			
			8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebeler kantor	100 %	100 %	100.000.000	100 %	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	tersedianya peralatan kantor	100 %	100 %	141.535.000	100%	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediany a gedung kantor atau bangunan	100 %	100 %	200.000.000	100 %	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersediany a sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100 %	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08	**Keg. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersediany a jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100 %**	**100 %**	**223.587.736**	**100 %**	**234.083.600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.08.01	Sub Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Terbayarny a jasa surat menyurat dan operasional Kantor	100 %	100 %	7.500.000	100 %	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarny a Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100 %	100 %	88.710.000	100 %	90.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Prosentase terpenuhinya peralatan dan bahn perlegkapan kebersihan Kantor	100 %	100 %	32.373.600	100 %	35.373.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	tersedianya n jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	95.004.136	100 %	98.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpeliharanya barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**157.605500**	**100 %**	**173.342.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	100 %	26.373.500	100 %	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan dinas	100 %	100 %	91.342.000	100 %	93.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	terbayarnya jasa pemeliharaan dan pajak perijinan kendaraan dinas	100 %	100 %	91.342.000	100 %	93.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebel kantor	100 %	100 %	10.000.000	100 %	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 %	10.000.000	100 %	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %	100 %	19.890.000	100 %	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	Kab. Jember
	Setelah Perubahan																						
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik di daerah	Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**8.01.02**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Pelaksanaan Pemahaman Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan**	-	-	-	-	-	100 %	770.000.000	100 %	820.000	100 %	870.000.000	100 %	920.000.000	100%	920.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.201	**Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	-	-	-	-	-	100 %	770.000.000	100 %	820.000.000	100 %	870.000.000	100 %	920.000.000	100%	920.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.2001.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa	-	-	-	-	-	6	130.000.000	7	135.000.000	7	140.000.000	8	145.000.000	28	145.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

				n, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan	n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah																	
			8.01.02.201.02	Perumusan kebijakan tehnis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	-	-	-	-	5	85.000.000	6	90.000.000	6	95.000.000	7	100.000.000	24	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.201.03	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	750	400.000.000	750	425.000.000	750	450.000.000	800	475.000.000	850	475.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Ka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	-	-	-	-	-	250	85.000.000	250	90.000.000	250	95.000.000	275	100.000.000	300	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

				rakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah																	
			8.01.02.2001.05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	4	70.000.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	24	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase Peningkatan pendidikan Politik Masyarakat**	-	-	-	-	-	**100 %**	**4.045.000.000**	**100 %**	**4.320.000.000**	**100 %**	**4.595.000.000**	**100 %**	**4.815.000.000**	**100 %**	**4.815.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.03.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	-	-	-	-	-	**100 %**	**4.045.000.000**	**100 %**	**4.320.000.000**	**100 %**	**4.595.000.000**	**100 %**	**4.870.000.000**	**100 %**	**4.870.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

				pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	**pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik**																		
				8.01.03.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik,Etika Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemnatauan situasi politik di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusu	-	-	-	-	-	11	3.500.000.000	11	3.700.000.000	11	3.900.000.000	11	4.045.000.000	44	4.045.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.03.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	-	-	-	-	11	120.000.000	11	130.000.000	11	140.000.000	11	150.000.000	44	150.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik , pemilihan umum/pemilihan umum kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	-	-	-	-	-	50	85.000.000	50	95.000.000	50	95.000.000	50	100.000.000	200	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

				daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di DaerahPerwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politilk, pemilihan uimum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	50	250.000.000	50	300.000.000	50	350.000.000	50	400.000.000	200	400.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partrai politilk, pemilihan uimum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	11	90.000.000	11	100.000.000	11	110.000.000	11	120.000.000	44	120.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pelaksanaan kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan politik**	-	-	-	-	-	**100%**	**290.000.000**	**100%**	**320.000.000**	**100%**	**350.000.000**	**100%**	**380.000.000**	**4**	**380.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.04.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyar**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	-	-	-	-	-	**100%**	**290.000.000**	**100%**	**320.000.000**	**100%**	**350.000.000**	**100%**	**380.000.000**	**4**	**380.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

				akatan																			
			8.01.04.2.01.01	Sub.Keg. penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing di Daera	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	-	-	-	-	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	4	150.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.02	penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	4	45.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	-	-	-	-	-	250	30.000.000	250	35.000.000	250	40.000.000	260	45.000.000	1010	45.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	250	35.000.000	250	40.000.000	250	45.000.000	260	50.000.000	1010	50.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediassi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	2	90.000.000	5	90.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	-	-	-	-	-	**100%**	**270.000.000**	**100%**	**292.500.000**	**100%**	**315.000.000**	**100%**	**337.500.000**	**100%**	**337.500.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

			8.01.05.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**270.000.000**	**100 %**	**292.500.000**	**100 %**	**315.000.000**	**100 %**	**337.500.000**	**100 %**	**337.500.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.05.2.01	**Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**80.000.000**	**12**	**82.500.000**	**12**	**85.000.000**	**12**	**87.500.000**	**48**	**87.500.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			'8.01.05.2.01.01	Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	-	-	-	-	-	12	80.000.000	12	82.500.000	12	85.000.000	12	87.500.000	48	87.500.000		

				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun																		
			'8.01.05.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	-	-	-	-	-	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	48	75.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, soisal,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	30	40.000.000	30	45.000.000	30	50.000.000	30	55.000.000	120	55.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	30	70.000.000	30	75.000.000	30	80.000.000	30	85.000.000	120	85.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang ketahanan, ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	48	35.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan**	-	-	-	-	-	**100 %**	**425.000.000**	**100 %**	**465.000.000**	**100 %**	**505.000.000**	**100 %**	**540.000.000**	**100 %**	**441.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**

				dan Fasilitasi Penanganan konflik sosial	**Nasional dan Penanganan konflik sosial**																		
			8.01.06.2.01	**Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial**	-	-	-	-	-	**100 %**	**425.000.000**	**100 %**	**465.000.000**	**100 %**	**505.000.000**	**100 %**	**540.000.000**	**100 %**	**441.000.000**	**Bakesbang pol**	**Kab. Jember**
			8.01.06.2.01.01	**Sub Keg. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah**	**Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**60.000.000**	**12**	**65.000.000**	**12**	**70.000.000**	**12**	**75.000.000**	**48**	**75.000.000**	**Bakesbang pol**	**Kab. Jember**
			8.01.06.2.01.02	Penyusunan bahan perumusan Kewaspadaan Dini, kerjasama	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	-	-	-	-	-	6	85.000.000	6	90.000.000	6	95.000.000	6	100.000.000	24	100.000.000	Bakesbang pol	Kab. Jmber

				Inteljen, Pemantauan Orang Asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan , serta penanganan konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																		
				8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	300	120.000.000	300	130.000.000	300	140.000.000	300	145.000.000	1200	145.000.000	Bakesbang pol	Kab. Jember
				8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	-	-	-	-	-	35	80.000.000	35	90.000.000	35	100.000.000	35	110.000.000	140	11.000.000	Bakesbang pol	Kab. Jember

				Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
			8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	48	110.000.000	Bakesbang pol	Kab. Jember
			8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	-	-	-	-	-	**100 %**	**6.499.400.460**	**100 %**	**7.332.042.655**	**100 %**	**8.377.080.266**	**100 %**	**9.273.816.899**	**100 %**	**9.273.816.899**	**Bakesbang pol**	**Kab. Jember**

			8.01.01.2.01	**Keg. Perencaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terbayarnya honor pengelola keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**306.972.000**	**100 %**	**320.222.000**	**100 %**	**333.472.000**	**100 %**	**346.722.000**	**100 %**	**319.222.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.01.01	**Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**289.222.000**		**299.222.000**		**309.222.000**		**319.222.000**	**0**	**319.222.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	4	5.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	4	3.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	4	3.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusuna	-	-	-	-	-	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	1	7.500.000	4	7.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

					n Dokumen Perubahan DPA-SKPD																		
			8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	4	4.000.000	4	4.500.000	4	5.000.000	4	5.500.000	16	5.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	4	1.750.000	4	2.000.000	4	2.250.000	4	2.500.000	16	2.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor**	-	-	-	-	-	**100%**	**3.877.313.796**	**100%**	**4.571.600.555**	**100%**	**5.342.920.666**	**100%**	**6.285.504.799**	**100%**	**6.285.504.799**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	22	3.151.333.796	22	3.781.600.555	22	4.537.920.666	22	5.445.504.799	88	5.445.504.799	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	-	-	-	-	-	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	48	40.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

					n Tugas ASN																		
			8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	12	495.980.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	575.000.000	48	575.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksnaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksnaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	4	40.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	1	95.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester	-	-	-	-	-	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	48	85.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

					SKPD																		
			8.01.01.2.05	**Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**11.000.000**	**100 %**	**13.200.000**	**100 %**	**15.400.000**	**100 %**	**16.500.000**	**100 %**	**16.500.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	22	11.000.000	22	13.200.000	22	15.400.000	22	16.500.000	88	16.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**365.896.500**	**100 %**	**399.296.500**	**100 %**	**432.314.000**	**100 %**	**465.716.500**	**100 %**	**465.716.500**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	-	-	-	1	3.602.500	1	3.802.500	1	4.000.000	1	4.202.500	15	4.202.500	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000		150.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	-	-	-	-	-	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	4	20.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jem

					Tangga yang Disediakan																		ber
			8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	69.406.000	1	71.406.000	1	73.406.000	1	75.406.000	4	75.406.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlahpaket barang cetakan dan pengganda an yang disediakan	-	-	-	-	-	1	18.500.000	1	19.000.000	1	19.500.000	1	20.000.000	4	20.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	12	3.400.000	12	3.600.000	12	3.800.000	12	4.000.000	48	4.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	1	6.380.000	1	6.880.000	1	7.000.000	1	7.500.000	4	7.500.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	1	55.608.000	1	58.608.000	1	61.608.000	1	64.608.000	4	64.608.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	4	75.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerinta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa	-	-	-	-	-	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	4	45.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jembe

				han Berbasis Elektronik pada SKPD	n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			r
			8.01.01.2.07	**Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**1.050.000.000**	**100 %**	**1.070.000.000**	**100 %**	**1.090.000.000**	**100 %**	**1.100.000.000**	**100 %**	**1.100.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	150.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	250.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.07	Pengdaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	250.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	-	-	-	-	-	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	4	100.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	250.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

			8.01.01.2.08	**Keg. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	100 %	315.359.200	100 %	333.373.600	100 %	516.373.600	100 %	372.373.600	100%	372.373.600	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	1	12.500.000	1	15.000.000	1	175.000.000	1	20.000.000	4	20.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	147.285.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	165.000.000	4	165.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	38.373.600	1	41.373.600	1	44.373.600	1	47.373.600	4	47.373.600	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	117.200.600	1	127.000.000	1	137.000.000	1	140.000.000	4	140.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			8.01.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	**100 %**	**572.858.964**	**100 %**	**624.350.000**	**100 %**	**646.600.000**	**100 %**	**687.000.000**	**100 %**	**687.000.000**	**Bakesbangpol**	**Kab. Jember**
			8.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	-	-	-	-	-	1	78.771.200	1	80.750.000	1	83.000.000	1	85.000.000	4	85.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

				Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajakanya																				
			8.01. 01.2. 09.02	Penyediaa n jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	-	-	-	-	-	1	152. 729. 200	1	155. 600. 000	1	157. 600. 000	1	160. 000. 000	4	160.00 0.00 0	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.05	Pemelihar aan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1	14.0 00.0 00	1	16.0 00.0 00	1	18.0 00.0 00	1	20.0 00.0 00	4	20.000 .000	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.06	Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1	45.0 00.0 00	1	50.0 00.0 00	1	50.0 00.0 00	1	50.0 00.0 00	4	50.000 .000	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.07	Pemelihar aan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1	20.0 00.0 00	1	25.0 00.0 00	1	30.0 00.0 00	1	30.0 00.0 00	4	30.000 .000	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.08	Pemelihar aan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	1	10.0 00.0 00	1	12.0 00.0 00	1	14.0 00.0 00	1	16.0 00.0 00	4	16.000 .000	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.09	Pemelihar aan / Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilita si	-	-	-	-	-	1	117. 358. 564	1	120. 000. 000	1	124. 000. 000	1	126. 000. 000	4	126.00 0.00 0	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r
			8.01. 01.2. 09.10	Pemelihar aan / Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilita	-	-	-	-	-	1	100. 000. 000	1	125. 000. 000	1	125. 000. 000	1	150. 000. 000	4	150.00 0.00 0	Bakesb ang pol	Kab . Jem be r

					si																		
			8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	4	50.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk lima tahun kedepan. Penetapan indicator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awalperiode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
SebelumPerubahan									
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100%	100%	100%					
Setelah Perubahan									
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)				100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai

dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

3. Harapan ke depan B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, ...

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
KabupatenJember

Dr. EDY BUDI SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001